

BAB V

KESIMPULAN

Setelah bertahun – tahun Tiongkok mencoba untuk menyikapi uji coba nuklir Korea Utara dengan tenang, akan tetapi pada tahun 2013 setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga tersebut, Tiongkok mulai merasa bahwa hal ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi keamanan nasionalnya dan hal ini berdampak pada stabilitas perdagangan antara Korea Utara dengan Tiongkok itu sendiri. Dengan memperhatikan hubungan eratnya dengan Korea Utara, Tiongkok yang merupakan rekan dagang utama Korea Utara, terus berusaha untuk dapat menghentikan uji coba nuklir tersebut supaya tidak dapat mengganggu stabilitas keamanan nasionalnya khususnya tidak mengganggu pertumbuhan perekonomiannya. Disisi lain, Korea Utara sebagai salah satu negara komunis yang memiliki energi nuklir terbesar didunia terus mencoba untuk mengembangkan dan melakukan uji coba nuklir untuk mendapatkan kekuatan dan pengakuan dari dunia internasional. Dengan kondisii ekonomi Korea Utara yang terus menurun, Korea Utara tidak dapat melepaskan hubungan bilateralnya dengan Tiongkok begitu saja. Disisi lain, Tiongkok terus memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini merupakan salah satu penyebab Korea Utara masih bergantung terhadap negeri tirai bambu tersebut.

Faktor – faktor yang menyebabkan Korea Utara mengembangkan energi nuklirnya ini karena nuklir dianggap bisa dijadikan sebagai efek gentar yang akan menggaransi kelangsungan hidup rejim Pyongyang, untuk mendapat bantuan ekonomi, dan untuk mempertahankan keamanan nasionalnya. Korea Utara memilih nuklir sebagai instrumen diplomasinya karena nuklir memiliki nilai tawar yang sangat tinggi, maka nuklir dapat dijadikan sebagai suatu instrumen kekuasaan negara yang optimal. Disisi lain energi nuklir dianggap memiliki dampak positif tersendiri yaitu dengan menggunakan energi nuklir yang dapat mengemat bahan bakar

fosil sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dan membantu perlindungan lingkungan dan bisa digunakan sebagai bahan bakar yang efisien, mengingat jumlah fosil sebagai bahan dasar bahan bakar minyak jumlahnya makin berkurang. Kemudian pada tahun 1985, Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama IAEA untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA yang bernama NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA dimulai pada Januari 1992 dengan menandatangani *safeguard agreement*.

Akan tetapi pada tahun 2003, Korea Utara mengundurkan diri dari NPT pada masa kepemimpinan Kim Jong Il karena bagi Korea Utara, perjanjian NPT tersebut dinilai tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan kedaulatan negaranya. Kemudian atas sikap ini, akhirnya Korea Utara kembali mengalami banyak tekanan dan reaksi keras dari dunia internasional atas pengembangan nuklirnya. Tidak lama setelah itu, Korea Utara juga langsung mengklaim atas kepemilikan sejumlah senjata nuklir aktif yang tidak digunakan untuk kepentingan publik dan perdamaian akan tetapi untuk kepentingan militer pada tahun 2005 silam. Disaat Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2006 dan 2009, hal tersebut dianggap menjadi salah satu ancaman bagi keamanan dunia internasional. Akan tetapi, Tiongkok masih merasa bahwa uji coba tersebut belum memberikan ancaman serius bagi keamanan nasional Tiongkok sehingga pada saat Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengeluarkan resolusi nomor 1718 dan 1874 sebagai tanggapan atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009, Tiongkok sebagai anggota tetap DK PBB terkesan diam dan tidak ingin terlalu ikut campur. Bahkan ketika dalam proses pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874, Tiongkok berupaya melemahkan isi sanksi dengan mengusulkan mekanisme tidak mengikat inspeksi kapal dan kargo yang dianggap mencurigakan.

Tiongkok memang merupakan rekan dagang utama dari Korea Utara dan Tiongkok selalu berusaha untuk membantu mempertahankan dan menjaga stabilitas rezim Korea Utara. Korea Utara juga mendapatkan bantuan seperti minyak dalam jumlah besar dan makanan tiap tahunnya dari Tiongkok. Akan tetapi, setelah uji coba nuklir Korea Utara yang ketiga tersebut, sikap Tiongkok mulai berubah terhadap Korea Utara karena uji coba nuklir ketiga tersebut dianggap menjadi ancaman serius bagi Tiongkok. Oleh karena itu, dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tersebut, Tiongkok mulai berperan aktif dalam penyusunan rancangan resolusi DK PBB NO 2094 dan mengaplikasikannya dengan cara pembatasan pemberian visa bagi pekerja asal Korea Utara sejak Februari 2014, menghentikan aliran minyak mentah pada periode 6 bulan pertama di tahun 2014, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 ini mengundang banyak kecaman dan ancaman dari negara – negara di dunia karena mereka menganggap bahwa uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 ini merupakan uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Korea Utara apabila dibandingkan dengan uji coba sebelumnya dan sangat mengancam keamanan dunia. Tidak sedikit negara negara di dunia yang mengancam Korea Utara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia. Selain itu, DK PBB juga mengeluarkan resolusi no 2094 dimana resolusi tersebut dianggap sebagai sanksi paling keras untuk menanggapi uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013.

Resolusi DK PBB dan adanya ancaman dari negara-negara di dunia ini merupakan faktor menurunnya nilai ekspor-impor Korea Utara dengan Tiongkok. Pasalnya, berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2094 dimana adanya pembekuan aset dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional sehingga Korea Utara akan kesulitan untuk dapat membayar barang-barang yang sudah diimpor oleh Korea Utara dari Tiongkok. Selain itu, ketatnya peraturan untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat Korea Utara ke luar negeri dan juga transportasi lain untuk melakukan

perjalanan melintas batas negara begitu juga sebaliknya yaitu transportasi dari luar Korea Utara yang ingin menuju ke Korea Utara yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya aktivitas perdagangan antara Korea Utara dengan Tiongkok. Hal ini berdampak terhadap perdangan yang dilakukan antara Korea Utara dengan Tiongkok yang terus menurun.

Selain itu ancaman yang berasal dari dunia internasional seperti Jepang yang mendesak negara-negara yang ada di dunia untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara, sehingga apabila negara negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara tersebut memutuskan hubungan diplomatiknya, maka Korea Utara juga tidak akan memiliki lagi kekuatan bahkan untuk mengembangkan energi nuklirnya karena Korea Utara sampai saat ini bisa mengembangkan nuklirnya berkat adanya kerjasama antara Korea Utara dengan negara negara luar khususnya dalam bidang ekonomi. Indonesia yang mencoba untuk mengaktifkan kembali Perundingan Enam Negara (*six party talks*) dan apabila perundingan tersebut di aktifkan kembali, maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi berat terhadap Korea Utara, karena Six Party Talks/Perundingan Enam Negara tersebut merupakan negosiasi multilateral untuk membahas penanggulangan program nuklir Korea Utara. Pasalnya, sebelumnya six party talks terkesan mati dan tak bisa memberikan kontribusi apapun di samping Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Korea Selatan serta Jepang, yang sangat menentang program nuklir Korea Utara.

Amerika Serikat yang sudah sejak awal menentang Korea Utara untuk adanya pengembangan nuklir yang dimilikinya tersebut, juga memberikan nacaman terhadap Korea Utara berupa sanksi yang menempatkan Korea Utara dalam daftar mengenai “*primary money laundering concern*” dan menutup akses Korea Utara terhadap sistem keuangan internasional untuk mencegah negara Korea Utara menggunakan bank untuk mencuci uang yang dapat digunakan

untuk program senjata nuklirnya. Jika penutupan akses terhadap sistem keuangan tersebut berhasil diaplikasikan dan tetap berjalan, maka Korea Utara akan mengalami kendala apabila ingin melakukan peminjaman uang baik itu untuk memproduksi (cari produk ekspor utama korea utara) maupun untuk mengembangkan energi nuklirnya. Hal ini juga akan berpengaruh apabila Korea Utara tidak dapat memproduksi barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri khususnya Tiongkok seperti biji besi dan batu bara, maka hal itu juga akan mempengaruhi kerjasama perdagangan diantara kedua negara tersebut menjadi tidak stabil.